

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urbanisasi sebagai salah satu fenomena yang marak terjadi di berbagai negara belahan dunia tentunya memberikan dampak pada kota yang mengalaminya. Saat ini tantangan urbanisasi yang pesat terletak pada negara-negara berkembang. Pada pertengahan abad ke-20 hanya 17,8% dari populasi dunia tinggal di kota, tetapi 50 tahun sejak tahun 1950 telah meningkat menjadi lebih dari 40%. Diperkirakan pada tahun 2030, hampir 60% dari populasi dunia akan tinggal di kota dan 93%-nya terjadi di negara berkembang dengan Asia sebagai kontributor utama (Xing, 2016). Penduduk perkotaan dunia diproyeksikan akan meningkat hingga 3 milyar jiwa antara tahun 2010-2050. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi desa-kota sebagai kontributor utama dalam urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di banyak negara berkembang, dimana konsentrasi investasi dan kesempatan kerja menjadi faktor penarik yang penting (Buhaug dan Urdal, 2013).

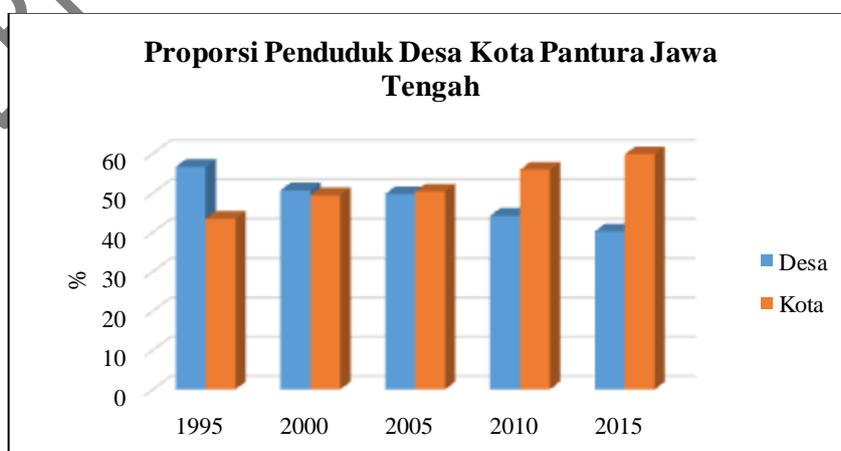
Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi yang tinggi berkaitan dengan tingginya pendapatan perkapita dan integral dengan pertumbuhan ekonomi meskipun bersifat relatif dan tidak selalu signifikan (McGranahan, 2015). Namun sayangnya tidak semua aspek urbanisasi menguntungkan secara ekonomi. Mereka yang memandang bahwa urbanisasi merupakan sarana kemajuan ekonomi umumnya menerima bahwa hal itu juga berkaitan dengan meningkatnya ketidaksetaraan baik antara desa-kota maupun yang terjadi di dalam wilayah perkotaan. Bahkan menurut perhitungan konvensional *income-based*, wilayah tumbuh kemiskinan terletak di wilayah perkotaan (McGranahan, 2015).

Kabupaten atau kota yang memiliki basis industri cenderung mengalami pertumbuhan penduduk urban yang lebih cepat. Hal ini khususnya dapat dilihat pada kabupaten/kota yang terletak di jalur pantai utara Jawa yang membentang dari Jakarta hingga Semarang melalui Cirebon. Jalur pantura merupakan jalan utama di Pulau Jawa yang dikenal pula dengan sebutan Jalan Nasional Rute 1. Jalan Pantura memiliki panjang total 1.316 km yang membentang di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa serta melewati 5 provinsi yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalur pantura dianggap sebagai urat nadi utama transportasi darat di Pulau Jawa yang setiap harinya dilalui sekitar 20.000 hingga 70.000 kendaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kabupaten atau kota sekitar jalur pantura menjadi sasaran masyarakat untuk melakukan perpindahan.

Tingkat urbanisasi yang tinggi di Pulau Jawa semakin berkembang pesat khususnya di ibukota provinsi dan kota-kota strategis lainnya. Salah satunya yakni di sekitar jalur Pantura Jawa

Tengah. Letaknya yang begitu strategis karena berada di bagian tengah Pulau Jawa membuat kawasan Pantura Jawa Tengah menjadi jembatan penghubung antara bagian barat dan timur Pulau Jawa. Oleh karena itu kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah menjadi salah satu sasaran investasi dalam bidang industri. Hal ini akan menarik perhatian masyarakat daerah lain yang melihat kabupaten atau kota tersebut sebagai ladang pekerjaan sehingga menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat desa yang berpindah ke kawasan perkotaan di wilayah sekitar jalur pantura. Di kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah, kawasan dalam didatangi para pendatang dari kawasan inti maupun sekitarnya. Masyarakat pendatang berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Dengan bertambahnya jumlah penduduk baik secara alami maupun akibat dari urbanisasi, kepadatan penduduk di kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah juga terus meningkat khususnya untuk kawasan pusat-pusat aktivitas seperti Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Rahayu (2015) tingkat urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2006. Dalam penelitian tersebut salah satu indikasi yang memperlihatkan adanya urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah yakni berkurangnya rumah tangga usaha pertanian dari 2.050.500 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 1.349.794 rumah tangga pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa tingkat urbanisasi kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2006. Kabupaten atau kota yang memiliki nilai tingkat urbanisasi di atas rata-rata yakni Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Kudus. Selain dari jumlah rumah tangga pertanian, urbanisasi yang terjadi di kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah juga dapat dilihat dari aspek demografi dimana jumlah penduduk perkotaan meningkat lebih pesat dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang cenderung menurun. Perubahan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan di daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



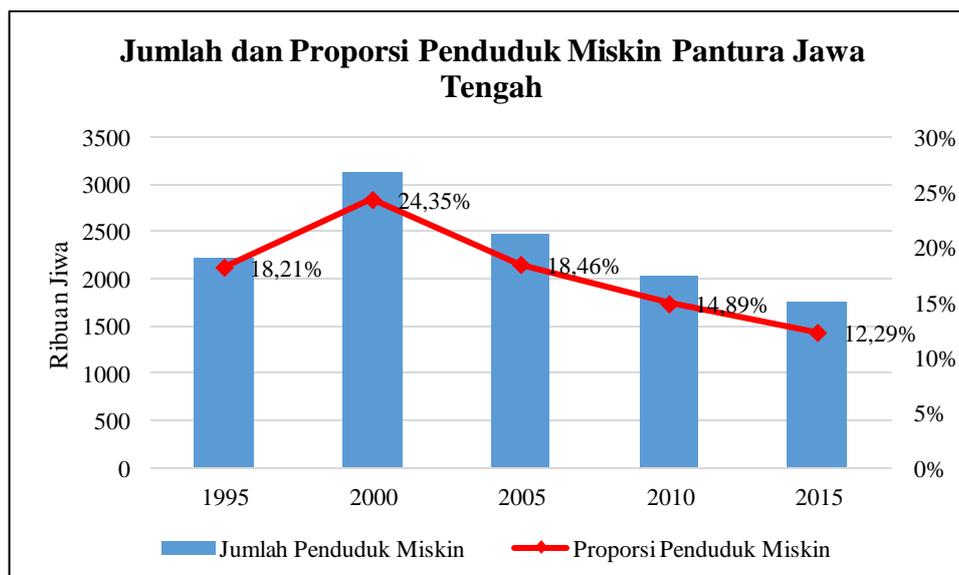
Sumber: BPS Jawa Tengah 1994-2015

Gambar 1.1
Proporsi Penduduk Desa Kota Pantura Jawa Tengah Tahun 1995-2015

Pada kebanyakan kasus, secara sederhana urbanisasi dapat dilihat dari konsentrasi penduduk. Menurut Hsieh (2014) urbanisasi adalah peningkatan proporsi penduduk suatu negara yang berada di daerah perkotaan, dimana ukuran kota tidak dipertimbangkan, sedangkan secara eksogen pertumbuhan kota adalah peningkatan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan. Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perkotaan terus meningkat untuk daerah Pantura Jawa Tengah. Oleh karena itu proporsi dari penduduk perkotaan di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai tingkat urbanisasi suatu wilayah.

McGranahan (2015) berpendapat bahwa tingkat urbanisasi integral dengan pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya di sisi lain urbanisasi menimbulkan beberapa masalah seperti ketidaksetaraan di dalam wilayah perkotaan yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Hubungan kompleks antara urbanisasi dan kemiskinan telah menimbulkan kekhawatiran di negara-negara berkembang. Dampak urbanisasi terhadap kemiskinan tidak selalu linier dan positif bagi semua negara atau wilayah. Ren, et al (2017) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa di sebagian besar daerah yang dilanda kemiskinan di China, tingkat urbanisasi memiliki dampak negatif pada kemiskinan. Urbanisasi mungkin juga berdampak negatif terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arouri, et al (2017) urbanisasi dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat untuk pengentasan kemiskinan. Daerah perkotaan cenderung kurang miskin jika dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga tingkat kemiskinan seluruh negara cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan. Namun, hubungan beragam antara urbanisasi dan kejadian kemiskinan mendukung bukti sebelumnya bahwa urbanisasi dapat membantu mengurangi kemiskinan, hanya saja dengan pengaruh yang bervariasi antar daerah.

Faktor penarik utama migrasi masuk ke kabupaten atau kota daerah Pantura Jawa Tengah adalah anggapan bahwa selalu terdapat lapangan pekerjaan, namun sayangnya tidak semua migran memiliki kualifikasi dan keterampilan yang baik sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara migrasi masuk para pekerja tidak terampil dan pertumbuhan ekonomi kotanya. Para pendatang yang tidak berhasil bersaing serta wilayah yang tidak siap menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya dalam aspek ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: BPS Jawa Tengah 1994-2015

Gambar 1.2
Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin Pantura Jawa Tengah Tahun 1995-2015

Secara garis besar kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan. Peningkatan proporsi penduduk miskin hanya terjadi pada tahun 1995 hingga 2000 yakni sebesar 6,14%. Sementara dari tahun 2000 hingga 2015 proporsi penduduk miskin berkurang hingga 12,06%. Kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, perubahan jumlah penduduk miskin pun dapat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi pun dapat berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.

Permasalahan yang harus diperhatikan dalam fenomena urbanisasi adalah ketika pertumbuhan penduduk di perkotaan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan untuk meningkatkan pelayanan mulai dari sarana prasarana, permukiman, hingga lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat memberikan beberapa dampak negatif seperti munculnya permukiman kumuh dan liar, meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, serta berbagai masalah lainnya. Kedepannya pertumbuhan kota membutuhkan perencanaan yang baik terutama dalam mengantisipasi kaum pendatang akibat adanya fenomena urbanisasi sehingga tidak akan menyebabkan dampak negatif.

Masyarakat pendatang tidak semuanya memiliki tingkatan *skill* yang sama sehingga tidak semuanya pula bisa mendapatkan pekerjaan di kota. Masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan memiliki kesempatan untuk menaikkan taraf ekonominya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, namun masyarakat yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan terancam masuk dalam “perangkap kemiskinan”. Melalui penelitian ini akan dilihat bagaimana keterkaitan antara

urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah. Apakah dengan adanya fenomena urbanisasi yang terjadi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan meningkat atau menurun.

1.2 Rumusan Masalah

Jalan Nasional Rute 1 atau yang lebih dikenal sebagai jalur pantura merupakan jalan utama transportasi darat Pulau Jawa yang membentang sepanjang 1.316 km di pesisir Pantai Utara Jawa serta melewati 5 provinsi. Kabupaten/kota sekitar jalur pantura tersebut menjadi daerah-daerah strategis yang tak luput dari fenomena urbanisasi. Faktor penarik utama migrasi masuk ke kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah adalah anggapan bahwa adanya lapangan pekerjaan yang lebih baik dan luas, namun sayangnya tidak semua migran memiliki kualifikasi dan keterampilan yang baik sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan ketidak seimbangan antara migrasi masuk para pekerja tidak terampil dan pertumbuhan ekonomi kotanya. Para pendatang yang tidak berhasil bersaing dan kabupaten/kota yang tidak siap menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya dalam aspek ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Kabupaten/kota sekitar jalur Pantura Jawa Tengah yang belum tentu dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pendatang serta ‘seleksi alam’ dalam mencari pekerjaan menyebabkan tidak semua masyarakat migran bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi kehidupan di perkotaan. Sementara mereka yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan akan kesulitan untuk menjalani kehidupan di kota dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor penyebab dalam kemiskinan perkotaan namun secara lebih lanjut akan diteliti **“Bagaimana hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah?”**. Melalui pertanyaan tersebut selanjutnya akan dilihat hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota sekitar jalur Pantura Jawa Tengah serta bagaimana perbedaannya. Urbanisasi memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek pembangunan nasional sehingga peranan pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur kebijaksanaan urbanisasi agar prosesnya dapat mencapai keseimbangan dalam suatu sistem urban yang secara efektif dapat memperluas pelayanan terhadap penduduk secara keseluruhan.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Secara umum pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan fenomena urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah. Secara lebih detail selanjutnya akan dianalisis bagaimana keterkaitan antara urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh kejelasan mengenai hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya kontrol urbanisasi. Harapan lebih jauh, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan khususnya untuk wilayah sekitar jalur Pantura Jawa Tengah.

1.3.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan penelitian diperlukan sasaran-sasaran untuk menjamin pencapaian tujuan. Berikut merupakan sasaran-sasaran yang harus dipehuni:

1. Mengidentifikasi karakteristik urbanisasi daerah Pantura Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi karakteristik kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah.
3. Menganalisis tingkat urbanisasi daerah Pantura Jawa Tengah.
4. Menganalisis tingkat kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah.
5. Menganalisis hubungan urbanisasi dan kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah.
6. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi bagi daerah Pantura Jawa Tengah terkait hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai “Hubungan Urbanisasi dan Kemiskinan di Kabupaten/kota Daerah Pantura Jawa Tengah” memiliki beberapa manfaat khususnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah terkait. Melalui penelitian ini akan dilihat dan dianalisis lebih dalam mengenai hubungan atau keterkaitan antara fenomena urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah. Secara lebih detail dapat dilihat bagaimana aspek-aspek urbanisasi mempengaruhi perkembangan kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah khususnya dalam hal kemiskinan sehingga dapat diketahui hubungan atau keterkaitan antara urbanisasi dan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah. Selain itu dapat dilihat juga variabel-variabel lain yang mempengaruhi perbedaan keterkaitan atau hubungan urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, dan perubahan fisik keruangan di kabupaten/kota terkait. Diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kontrol urbanisasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

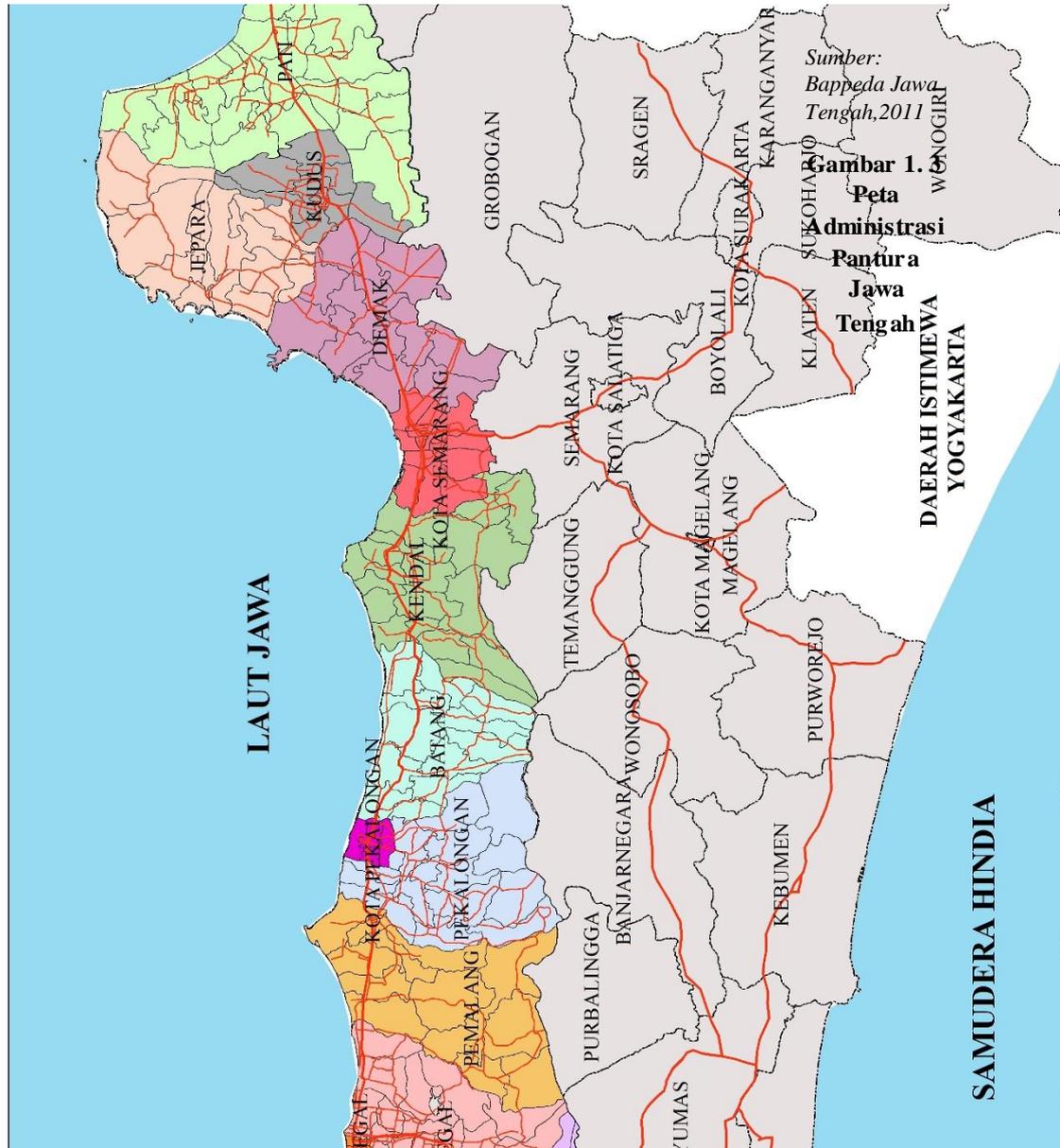
Pembatasan ruang lingkup materi dilakukan untuk lebih memfokuskan pembahasan sesuai dengan tema yang diambil. Berdasarkan tema yang diambil, ruang lingkup materi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- Kajian mengenai aspek-aspek urbanisasi dan perkembangannya di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang dilewati oleh jalur pantura. Aspek-aspek urbanisasi ini dapat dilihat melalui pertumbuhan penduduk perkotaan, perubahan struktur PDRB, akses terhadap sarana dan prasarana, serta perubahan penggunaan lahan. Dari aspek-aspek tersebut akan dilihat perubahannya dalam kurun waktu 1995 hingga 2015.
- Kajian mengenai kondisi kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang dilewati oleh jalur pantura yang dapat dilihat melalui jumlah penduduk miskin dan perubahannya dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 1995 hingga 2015. Selain itu akan dilihat juga aspek-aspek lainnya yang dapat menentukan kemiskinan seperti akses terhadap sarana prasarana, angka kematian bayi, lama sekolah, AMH, dan lain sebagainya.
- Menganalisis bagaimana hubungan urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang dilewati oleh jalur pantura dengan cara membandingkan urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya hasil perbandingan tersebut akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu untuk dianalisis lebih lanjut sehingga dapat terlihat bagaimana hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang dilewati oleh jalur pantura dalam kurun waktu 1995 hingga 2015.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

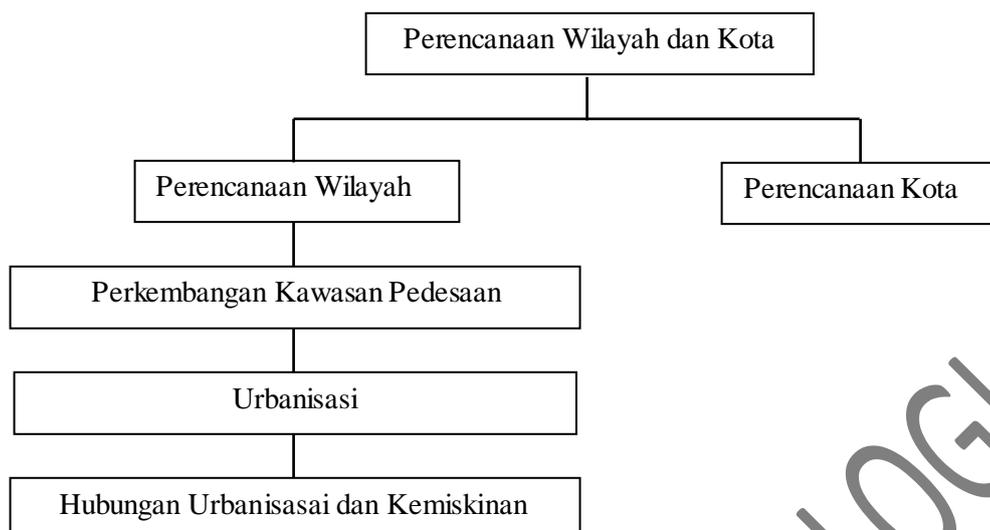
Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 3 kota yakni Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Peta administrasi daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.4.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI



1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian menunjukkan letak tema penelitian di dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Berdasarkan sudut pandang kewilayahan urbanisasi merupakan proses perubahan sifat dan karakteristik kawasan pedesaan menjadi kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik perkotaan meskipun tidak secara langsung menjadi kawasan perkotaan secara sepenuhnya. Dalam studi ilmu perencanaan, analisis mengenai hubungan urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah termasuk kedalam lingkup kewilayahan sehingga memiliki pendekatan yang berbeda dengan perencanaan kota. Berikut merupakan posisi penelitian dalam bidang perencanaan wilayah dan kota:



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Gambar 1.4
Posisi Penelitian dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

1.7 Kerangka Pikir

Wilayah studi yang diambil dalam penelitian ini adalah daerah Pantura Jawa Tengah mulai dari Kabupaten Rembang hingga Kabupaten Brebes. Daerah pantura ini memiliki pertumbuhan penduduk perkotaan yang lebih pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan urbanisasi juga akan terjadi perubahan dalam hal perekonomian. Namun adanya ketidakseimbangan antara migrasi masuk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya fluktuasi angka kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah.

Dari kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa urbanisasi memberikan dampak terhadap kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah, namun belum diketahui apakah urbanisasi akan mengurangi atau justru meningkatkan kemiskinan. Maka dari itu akan dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah. Apakah berdampak positif atau negatif serta apakah masing-masing kabupaten/kota memiliki hubungan urbanisasi dan kemiskinan yang sama atau berbeda. Jika memang terdapat hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan selanjutnya dapat dilihat bagaimana kekuatan hubungan atau korelasi dan signifikansi antara urbanisasi dan kemiskinan di wilayah studi. Apakah semua kabupaten/kota memiliki kekuatan korelasi yang sama atau berbeda.

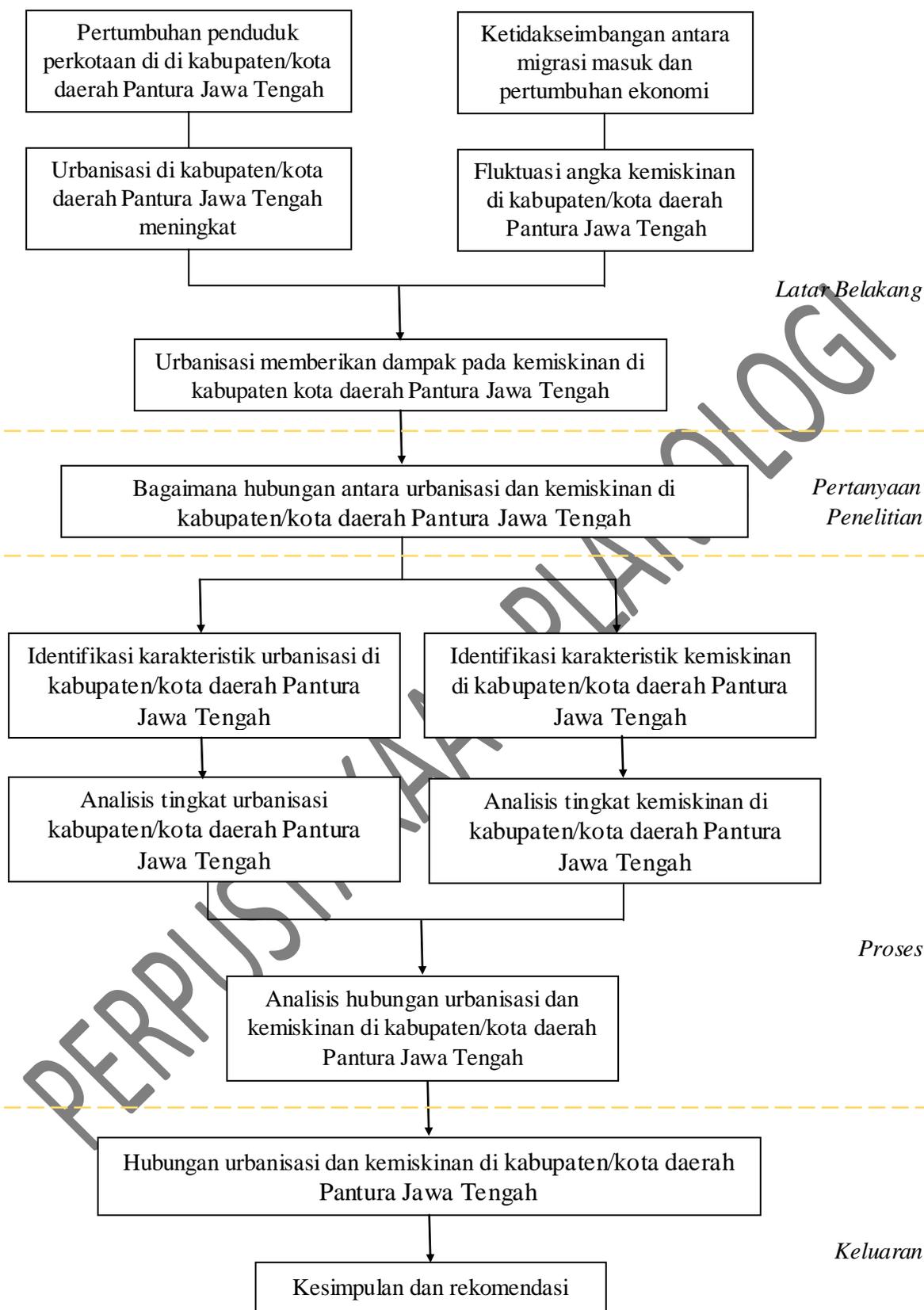
Dalam proses penelitian terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai diantaranya mengidentifikasi karakteristik urbanisasi dan kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut akan digunakan untuk melakukan analisis tingkat urbanisasi dan kemiskinan. Dari hasil kedua analisis tersebut kemudian dilakukan analisis hubungan urbanisasi

dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah. Setelah dilakukan analisis ini akan diketahui bagaimana hubungan urbanisasi dan kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota di daerah Pantura Jawa Tengah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan terkait pengaturan urbanisasi agar lebih seimbang dan teratur bagi pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah Pantura Jawa Tengah. Dari penjelasan tersebut dibuat suatu kerangka pikir yang merupakan diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian agar lebih mudah dilihat dan dipahami. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar. 1.5.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka dasar yang menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Semakin baik metode yang digunakan maka akan didapatkan hasil penelitian yang terjamin tingkat validitasnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Penelitian ini bersifat deduktif yang dilandasi pada teori-teori terkait tema yang diangkat yakni urbanisasi dan kemiskinan yang kemudian digunakan untuk membuat hipotesis yang akan diuji menggunakan data empiris lapangan yang didapatkan. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari serta melihat hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif memiliki tujuan utama untuk menjelaskan dengan teliti terkait makna dibalik angka-angka yang ada dalam lingkup yang lebih luas. Tema penelitian mengenai hubungan urbanisasi dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah berkaitan erat dengan angka-angka yang mewakili kondisi eksisting dari variabel-variabel yang digunakan. Angka-angka tersebut mencerminkan karakteristik urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi. Melalui pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah akan diterapkan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat berdasarkan data eksisting yang didapatkan.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Gambar 1.5
Kerangka Pikir

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur dan survei instansional. Kajian literatur dilakukan terhadap teori, buku, jurnal dan artikel untuk mencari informasi mengenai tingkat urbanisasi dan kemiskinan. Informasi yang didapatkan melalui kajian literatur selanjutnya akan digunakan sebagai indikator penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam kajian literatur dapat berupa laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah, organisasi lainnya, maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan survei instansional dilakukan untuk mencari data-data sekunder yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintah terkait. Pada penelitian ini survei instansional dilakukan pada Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dengan data tahun 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2015.

Dalam melakukan proses pengumpulan data hal paling utama yang harus disiapkan adalah rincian kebutuhan data. Kebutuhan data merupakan daftar data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan, sebagai input dalam proses analisis nantinya. Daftar ini sangat diperlukan untuk mempermudah teknis pelaksanaan dalam pengumpulan data, sehingga lebih terarah dan diharapkan tidak ada data yang terlewatkan ataupun penumpukkan data. Adapun kebutuhan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kebutuhan Data

No	Variabel	Indikator	Data	Sumber	Tahun
1	Tingkat Urbanisasi	Spasial	Luas lahan pertanian	BPS	1995, 2000, 2005, 2010, 2015
			luas lahan terbangun	BPS	
		Demografi	Kepadatan penduduk	BPS	
			Jumlah penduduk perkotaan	BPS	
			Jumlah tenaga kerja pertanian	BPS	
			Jumlah tenaga kerja industri	BPS	
		Ekonomi	Jumlah tenaga kerja	BPS	
			Pertumbuhan ekonomi	BPS	
			Jumlah industri	BPS	
			PDRB	BPS	
Sosial	Jumlah RT memiliki jamban	BPS			
	Jumlah RT berlangganan listrik	BPS			
2	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	BPS	1995, 2000, 2005, 2010, 2015
		Proporsi penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	BPS	
			Jumlah penduduk total	BPS	
		Akses sanitasi	Jumlah RT memiliki jamban	BPS	
		Akses air bersih	Jumlah RT dengan akses air bersih	BPS	
		Angka kematian bayi	Angka kematian bayi	BPS, Dinas kesehatan	
Angka kematian ibu	Angka kematian ibu	BPS,	1995, 2000,		

No	Variabel	Indikator	Data	Sumber	Tahun
				Dinas kesehatan	2005, 2010, 2015
		Lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	BPS	
		Angka melek huruf	Angka melek huruf	BPS	
		Akses jaringan listrik	Jumlah pelanggan listrik	BPS	
			Jumlah penduduk total	BPS	

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

1.8.3 Metode Analisis

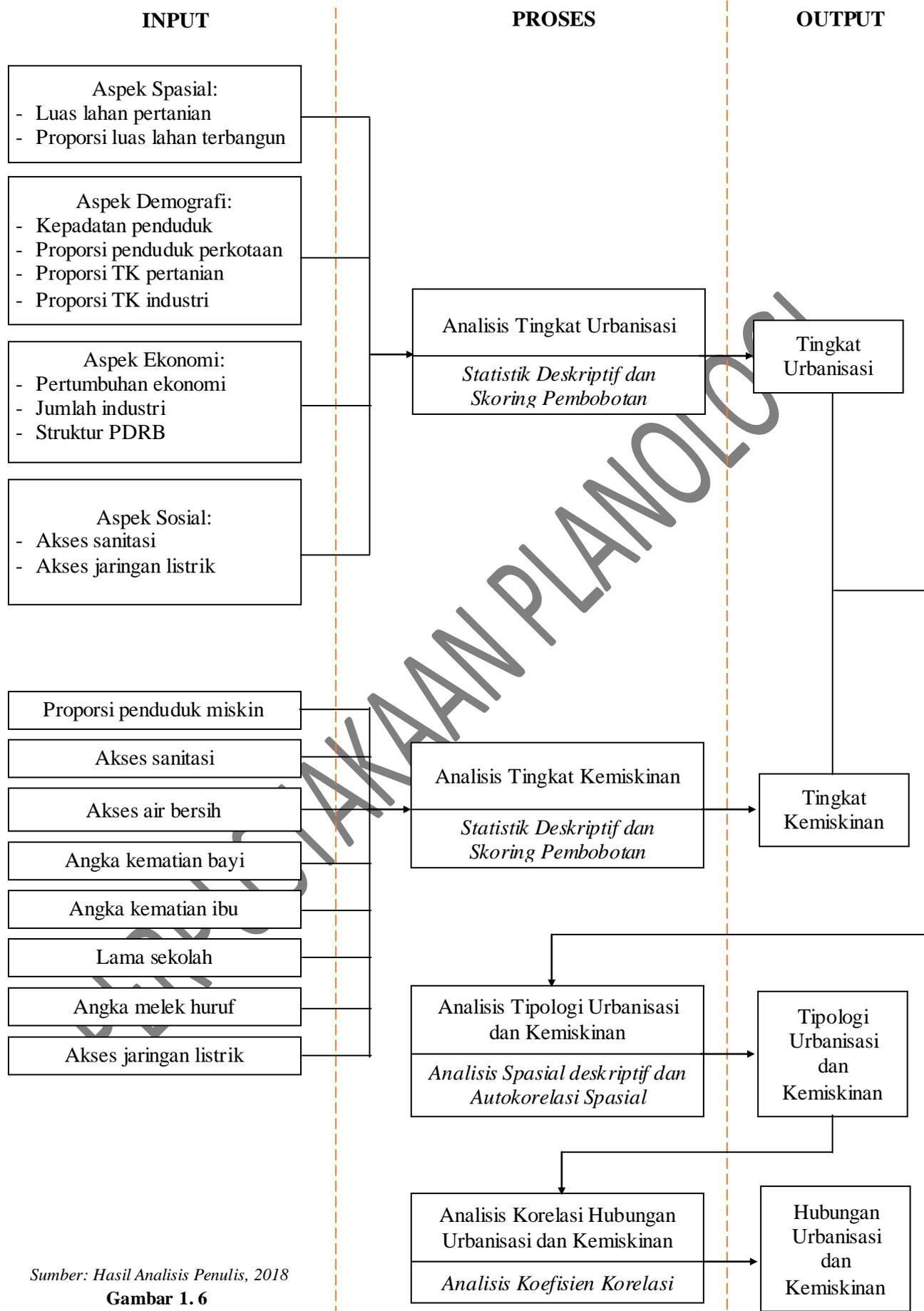
Kerangka analisis disusun untuk memudahkan proses analisis sehingga lebih sistematis dan terstruktur. Kerangka tersebut disusun berdasarkan data (*input*) yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan hasil (*output*) yang akan diterima. Kerangka analisis penelitian mengenai hubungan urbanisasi dan kemiskinan di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian hipotesis terhadap kondisi eksisting di lapangan untuk menguji kebenaran teori yang digunakan. Dalam menjelaskan kondisi eksisting wilayah studi dibutuhkan informasi berdasarkan data-data yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis tertentu. Beberapa teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian mengenai hubungan urbanisasi dan kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a) Analisis Tingkat Urbanisasi

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah adalah statistik deskriptif, skoring, pembobotan, dan spasial deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik urbanisasi daerah Pantura Jawa Tengah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya dalam sintesa literatur.

Indikator yang digunakan untuk melihat karakteristik urbanisasi dibagi kedalam 4 jenis yakni spasial, demografi, ekonomi, dan sosial yang setiap indikatornya memiliki sub-indikator masing-masing. Aspek spasial dapat dilihat melalui luas lahan pertanian, dan proporsi luas lahan terbangun. Aspek demografi dapat dilihat melalui kepadatan penduduk, proporsi penduduk perkotaan, jumlah penduduk pertanian, dan jumlah tenaga kerja industri. Aspek ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, jumlah industri, perubahan struktur PDRB, dan perubahan matapencaharian. Sedangkan aspek sosial dapat dilihat melalui akses pendidikan, akses sanitasi, dan jumlah pelanggan listrik.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Gambar 1. 6
Kerangka Analisis

Setelah karakteristik urbanisasi untuk masing-masing wilayah diketahui berdasarkan indikator diatas, selanjutnya akan dilakukan skoring dan pembobotan untuk mengetahui tingkat urbanisasi. Skor dan bobot yang digunakan dalam menentukan tingkat urbanisasi dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I. 2
Skor dan Bobot Indikator Tingkat Urbanisasi

No	Indikator	Sub-Indikator	Klasifikasi	Bobot	Skor
1	Spasial	Proporsi luas lahan pertanian	Rendah (10% -27%)	1	3
			Sedang (>27% -42%)		2
			Tinggi (>42% -58%)		1
		Proporsi luas lahan terbangun	Tinggi (>42% -58%)	2	3
			Sedang (>26% - 42%)		2
			Rendah (8% -26%)		1
2	Demografi	Kepadatan penduduk	Tinggi (>57-83 jiwa/Ha)	2	3
			Sedang (>32-57 jiwa/Ha)		2
			Rendah (5-32 jiwa/Ha)		1
		Proporsi penduduk perkotaan	Tinggi (>73% -100%)	3	3
			Sedang (>45% - 73%)		2
			Rendah (17% -45%)		1
		Proporsi tenaga kerja pertanian	Tinggi (>42%-62%)	2	1
			Sedang (>23% - 42%)		2
			Rendah (2% -23%)		3
		Proporsi tenaga kerja industri	Tinggi (>33% -48%)	1	3
			Sedang (>18% - 33%)		2
			Rendah (3% -18%)		1
3	Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Tinggi (> 5%)	2	3
			Sedang (>3% -5%)		2
			Rendah (< 3%)		1
		Jumlah industri	Tinggi (>32.500-47.500)	1	3
			Sedang (17.500-32.500)		2
			Rendah (<17.500)		1
		Struktur PDRB	Tersier	3	3
			Sekunder		2
			Primer		1
4	Sosial	Akses sanitasi	Tinggi (>80%)	1	3
			Sedang (>61% -80%)		2
			Rendah (40% - 61%)		1
		Akses jaringan listrik	Tinggi (>71%)	1	3
			Sedang (>44% -71%)		2
			Rendah (17% -44%)		1
Skor Minimal					19
Skor Maksimal					57

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Metode pembobotan yang akan digunakan adalah metode *rank sum* yang merupakan metode pemberian bobot sederhana dimana dalam penyusunan bobot dibuat dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Kriteria dan bobot dibuat berdasarkan pertimbangan pembuat

keputusan. Pemberian bobot yang berbeda dari tiap-tiap indikator didasarkan pada nilai kepentingan dan signifikansi pengaruh indikator-indikator tersebut dalam menentukan tingkat urbanisasi suatu wilayah. Nilai kepentingan yang diberikan berkisar 1-3, semakin tinggi nilai tingkat kepentingan yang diberikan maka semakin penting pula kriteria tersebut. Berikut adalah penjelasan dari bobot yang diberikan:

Tabel I.3
Kriteria Penentuan Bobot Tingkat Urbanisasi

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
1	Proporsi luas lahan pertanian	1	Arouri et al, 2017 mengatakan luas lahan pertanian terus berkurang seiring dengan meningkatnya urbanisasi. Perubahan dari lahan pertanian ke lahan nonpertanian mengindikasikan adanya urbanisasi, namun tidak semua lahan nonpertanian merupakan lahan terbangun
2	Proporsi luas lahan terbangun	2	Lahan pertanian yang berkurang seiring dengan meningkatnya urbanisasi akan berubah menjadi lahan-lahan terbangun untuk kawasan permukiman maupun lapangan kerja nonpertanian (Arouri et al, 2017)
3	Kepadatan penduduk	2	Buhaug dan Urdal, 2013 menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk alami menjadi salah satu faktor penentu urbanisasi. Kepadatan penduduk menunjukkan adanya konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu
4	Proporsi penduduk perkotaan	3	Katherina, 2014 mengemukakan tingkat urbanisasi suatu wilayah dilihat dari proporsi penduduk perkotaan terhadap penduduk keseluruhan.
5	Proporsi tenaga kerja pertanian	2	Berkurangnya lahan pertanian akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada sektor pertanian semakin terbatas
6	Proporsi tenaga kerja industri	1	Urbanisasi yang berdampak pada pergeseran sektor basis dari pertanian ke nonpertanian menyebabkan lapangan kerja yang semakin terbatas pada sektor pertanian sehingga masyarakat akan beralih pada sektor non pertanian salah satunya industri
7	Pertumbuhan ekonomi	2	Urbanisasi tidak hanya berkaitan dengan masalah demografis tetapi juga pertumbuhan ekonomi (Singarimbun, 1996) Wilayah yang mengalami urbanisasi pada umumnya akan mengalami kenaikan dalam perekonomian
8	Jumlah industri	1	Urbanisasi akan memberikan dampak positif seperti berkembangnya wirausaha (Bintaro dalam Saefuloh, 2011)
9	Struktur PDRB	3	Urbanisasi memberikan dampak pada pergeseran sektor basis (Arouri et al, 2017)
10	Akses sanitasi	1	Salah satu faktor penarik urbanisasi adalah daya tarik kota dalam ketersediaan layanan dan fasilitas (Ahmad, 2002) Kawasan urbanisasi cenderung memiliki pola hidup yang lebih sehat dan modern sehingga akses sanitasi atau kepemilikan jamban merupakan salah satu hal dasar

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
			dalam kehidupan sehari-hari
11	Akses jaringan listrik	1	Salah satu faktor penarik urbanisasi adalah daya tarik kota dalam ketersediaan layanan dan fasilitas (Ahmad, 2002) Wilayah perkotaan memiliki tuntutan akuritas yang besar sehingga dibutuhkan akses jaringan listrik yang baik untuk mencapai seluruh kawasan khususnya untuk mendukung penyebaran informasi

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

11 kriteria atau indikator tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan klasifikasi dan skor bagi tiap kabupaten/kota, untuk lebih jelasnya yakni sebagai berikut:

- Proporsi luas lahan pertanian

Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun merupakan salah satu ciri dari terjadinya urbanisasi. Dalam penentuan skornya akan digunakan proporsi luas lahan pertanian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi lahan pertanian} = \frac{\text{luas lahan pertanian}}{\text{luas lahan total}} \times 100 \%$$

- Proporsi luas lahan terbangun

Seperti yang dijelaskan pada poin diatas dengan adanya alih fungsi lahan pertanian, luas lahan terbangun akan bertambah dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk baik untuk permukiman, infrastruktur, maupun lapangan pekerjaan. Dalam penentuan klasifikasinya akan digunakan proporsi luas lahan terbangun dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi lahan terbangun} = \frac{\text{luas lahan terbangun}}{\text{luas lahan total}} \times 100 \%$$

- Kepadatan penduduk

Meningkatnya kepadatan penduduk menjadi salah satu dampak dari adanya urbanisasi. Semakin tinggi kepadatan penduduk pada suatu wilayah maka indikasi terjadinya urbanisasi akan semakin tinggi. Berikut merupakan rumus perhitungan kepadatan penduduk:

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{luas wilayah (Ha)}}$$

- Proporsi penduduk perkotaan

Berdasarkan Hsieh (2014) urbanisasi adalah peningkatan proporsi penduduk suatu negara yang berada di daerah perkotaan, di mana ukuran kota tidak dipertimbangkan. Sehingga secara umum ukuran akhir dari tingkat urbanisasi dilihat dari proporsi penduduk perkotaan dalam suatu kota. Berikut rumus perhitungan proporsi penduduk perkotaan:

$$\text{Proporsi penduduk perkotaan} = \frac{\text{jumlah penduduk perkotaan}}{\text{jumlah penduduk total}} \times 100 \%$$

- Proporsi tenaga kerja pertanian

Fenomena urbanisasi memberikan dampak pada pergeseran sektor basis yang merangsang transisi dari pertanian ke kegiatan nonpertanian (Arouri et al, 2017). Hal ini salah satunya dapat dilihat dari jumlah penduduk pertanian yang ada di masing-masing wilayah. Dalam penentuan klasifikasi dan skor akan digunakan proporsi penduduk pertanian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi TK pertanian} = \frac{\text{jumlah tenaga kerja pertanian}}{\text{total tenaga kerja}} \times 100 \%$$

- Proporsi tenaga kerja industri

Sama dengan poin sebelumnya, pergeseran dari kegiatan pertanian menuju kegiatan nonpertanian salah satunya dapat berupa pada sektor industri sehingga jumlah tenaga kerja industri bertambah. Dalam penentuan klasifikasi dan skor akan digunakan proporsi penduduk pertanian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi TK industri} = \frac{\text{jumlah TK industri}}{\text{total tenaga kerja}} \times 100 \%$$

- Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan McGranahan (2015) tingkat urbanisasi integral dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat urbanisasi suatu wilayah cenderung menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- Jumlah industri

Bintaro dalam Saefuloh (2011) berpendapat bahwa urbanisasi akan memberikan dampak positif berupa bervariasinya sektor ekonomi dan berkembangnya wirausaha. Bergesernya sektor basis dari pertanian ke nonpertanian seperti industri dapat menyebabkan bertambahnya jumlah industri yang ada pada suatu wilayah. konversi lahan pertanian yang terjadi dalam urbanisasi salah satunya dapat digunakan untuk pembangunan industri.

- Perubahan struktur PDRB

Pergeseran struktur basis dari pertanian ke nonpertanian salah satunya dapat dilihat melalui nilai PDRB dari masing-masing wilayah. Apakah sektor tersier, primer, atau sekunder yang memberikan kontribusi nilai output terbesar dalam PDRB wilayah tersebut.

- Akses sanitasi

Ren et al (2017) berpendapat bahwa urbanisasi telah meningkatkan akses terhadap pipa air, sanitasi, dan listrik. Ada kemungkinan bahwa urbanisasi

meningkatkan permintaan dan pengetahuan rumah tangga pedesaan tentang sanitasi, atau alternatifnya, bahwa urbanisasi mengarah pada perbaikan infrastruktur. Akses sanitasi salah satunya dapat dilihat melalui jumlah rumah tangga yang memiliki jamban.

- Jumlah pelanggan listrik

Sama seperti pada poin diatas, jumlah pelanggan listrik dapat menjadi salah satu indikasi adanya urbanisasi. Dalam pemberian skor akan dilihat melalui proporsi rumah tangga yang berlangganan listrik.

Pembobotan dilakukan untuk membantu proses penarikan secara spasial yang mengandung parameter tertentu. Salah satu metode yang sering dilakukan adalah melalui ranking dimana setiap parameter akan disusun berdasarkan tingkatan tertentu. Setiap indikator penelitian akan memiliki bobot yang berbeda tergantung dari pengaruhnya terhadap variabel terkait. Pemberian bobot didasarkan pada keterkaitan indikator dengan variabel yang didapatkan berdasarkan kajian literatur pada bab 2. Setelah dilakukan skoring dan pembobotan untuk seluruh indikator akhirnya akan didapatkan skor akhir yang akan menentukan tingkatan untuk variabel tingkat urbanisasi. Penentuan tingkat urbanisasi akan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata skor yang diperoleh. Nilai tersebut selanjutnya akan menjadi batasan penentu apakah masing-masing wilayah termasuk dalam tingkat urbanisasi tinggi atau rendah. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata yang didapatkan adalah 36,6. Sehingga pembagian tingkatan urbanisasi adalah sebagai berikut.

Tabel I 4
Klasifikasi Skor Tingkat Urbanisasi

No	Skor	Tingkatan
1	22 - 36,6	Rendah
2	>36,6 – 54	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Setelah melakukan skoring dan pembobotan akan didapatkan tingkatan urbanisasi untuk masing-masing wilayah. Hasil tersebut kemudian akan dipetakan berdasarkan batasan wilayah administratif. Teknik spasial deskriptif akan digunakan pada tahapan ini untuk melihat pola-pola tingkatan urbanisasi yang terbentuk secara kewilayahan.

b) Analisis Tingkat Kemiskinan

Sama seperti analisis tingkat urbanisasi, analisis tingkat kemiskinan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, skoring, pembobotan, dan spasial deskriptif. Terdapat 9 indikator yang digunakan dalam menganalisis tingkat kemiskinan yakni jumlah penduduk miskin, proporsi penduduk miskin, akses sanitasi, angka kematian bayi, akses sarana kesehatan, lama sekolah, angka melek huruf, akses sarana pendidikan, dan proporsi

masyarakat terlayani jaringan listrik. Skor dan bobot yang digunakan dalam menentukan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel I.5.

Tabel I 5
Skor dan Bobot Indikator Tingkat Kemiskinan

No	Indikator	Klasifikasi	Bobot	Skor
1	Proporsi penduduk miskin	Tinggi (>29% -41%)	3	3
		Sedang (>17% -29%)		2
		Rendah (4% -17%)		1
2	Akses sanitasi	Tinggi (>80%)	2	1
		Sedang (>61% -80%)		2
		Rendah (40% - 61%)		3
3	Akses air bersih	Tinggi (>81%)	2	1
		Sedang (>63% -81%)		2
		Rendah (44% -63%)		3
4	Angka kematian bayi	Tinggi (>15-19)	2	3
		Sedang (>10-15)		2
		Rendah (5-10)		1
5	Angka kematian ibu	Tinggi (>180-244)	2	3
		Sedang (>116-180)		2
		Rendah (52-116)		1
6	Lama sekolah	Tinggi (>9-11 tahun)	2	1
		Sedang (>7-9 tahun)		2
		Rendah (5-7 tahun)		3
7	Angka melek huruf	Tinggi (>91)	2	1
		Sedang (>83-91)		2
		Rendah (75-83)		3
8	Akses jaringan listrik	Tinggi (>71%)	2	1
		Sedang (>44% -71%)		2
		Rendah (17% -44%)		3
Skor Minimal				17
Skor Maksimal				51

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Dalam menentukan bobot untuk masing-masing indikator akan digunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Pemberian nilai 1-3 didasarkan pada nilai kepentingan dan signifikansi pengaruh suatu indikator dalam menentukan tingkat kemiskinan dimana semakin tinggi nilai tingkat kepentingan yang diberikan maka semakin penting pula kriteria tersebut dalam menentukan tingkat kemiskinan. Berikut adalah penjelasan dari bobot yang diberikan:

Tabel I 6
Kriteria Penentuan Bobot Tingkat Kemiskinan

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
1	Proporsi penduduk miskin	3	Proporsi penduduk miskin secara langsung akan menggambarkan tingkat kemiskinan suatu wilayah
2	Akses sanitasi	2	Kualitas kehidupan merupakan salah satu indikator MPI dalam mengukur kemiskinan. Diantaranya adalah

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
3	Akses air bersih	2	melalui akses sanitasi dan air bersih (Budiantoro et al, 2013). Meskipun masyarakat menyadari akan pentingnya hal tersebut namun jika mereka memiliki keterbatasan biaya akan sulit untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dalam kualitas hidup yang baik
4	Angka kematian bayi	2	Berdasarkan Budiantoro et al, 2013 AKB merupakan salah satu indikator dimensi kesehatan dalam pengukuran kemiskinan menggunakan metode MPI. Faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi angka kematian bayi
5	Angka kematian ibu	2	Berdasarkan Departemen Kesehatan, 2014 AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dimana dalam hal ini kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
6	Lama sekolah	2	MPI juga menggunakan dimensi pendidikan dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah diantaranya lama sekolah dan melek huruf (Budiantoro et al, 2013). Terpenuhinya hal ini akan meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk
7	Angka melek huruf	2	
8	Akses jaringan listrik	2	Berdasarkan Budiantoro et al, 2013 sumber penerangan merupakan salah satu indikator dalam dimensi kualitas kehidupan dalam pengukuran kemiskinan menggunakan indikator MPI.

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

8 kriteria atau indikator diatas akan dianalisis untuk mendapatkan klasifikasi dan skor bagi tiap kabupaten/kota, untuk lebih jelasnya yakni sebagai berikut:

- Proporsi penduduk miskin

Dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah tentunya perlu diperhatikan proporsi penduduk miskin pada wilayah tersebut. Semakin tinggi proporsi penduduk miskin maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Perhitungan proporsi penduduk miskin dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Proporsi penduduk miskin} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk total}} \times 100 \%$$

- Akses sanitasi

Kemiskinan merupakan konsep multidimensi yang dapat diukur melalui berbagai macam aspek. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan metode MPI adalah kualitas hidup yang dapat dilihat melalui sanitasi. Akses sanitasi salah satunya dapat dilihat melalui jumlah rumah tangga yang memiliki jamban. Akan dilakukan perbandingan

jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dengan jumlah rumah tangga total untuk melihat proporsi rumah tangga yang memiliki jamban.

- Akses air bersih

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah akses air bersih dimana merupakan kebutuhan dasar sehari-hari. Akses air bersih akan dilihat melalui jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Akan dilakukan perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dengan jumlah rumah tangga total untuk melihat proporsi rumah tangga yang memiliki akses air bersih.

- Angka kematian bayi

Angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur kemiskinan dalam metode MPI. Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh BPS Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berikut merupakan rumus perhitungan AKB:

$$AKB = \frac{\sum \text{kematian } 0- < 1 \text{ tahun}}{\sum \text{kelahiran hidup}} \times 1000$$

- Angka kematian ibu

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan (42 hari setelah berakhirnya kehamilan) per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Berikut merupakan rumus perhitungan AKB:

$$AKI = \frac{\sum \text{kematian ibu} \times \sum \text{kelahiran hidup}}{100.000}$$

- Lama sekolah

Lama sekolah merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur kemiskinan dalam metode MPI. Dengan adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diterapkan sejak tahun 1994 dan ditargetkan tuntas pada tahun 2008 serta kebijakan wajib belajar 12 tahun yang mulai diterapkan sejak tahun 2013

diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan rata-rata lama bersekolah hingga menjadi 12 tahun.

- Angka melek huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur kemiskinan dalam metode MPI. Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh BPS Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk total usia 15 tahun ke atas. Berikut merupakan rumus perhitungan AKB:

$$AKB = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

b = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

- Proporsi masyarakat terlayani jaringan listrik

Sumber penerangan merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur kemiskinan dalam metode MPI. Sumber penerangan dapat dilihat melalui banyaknya pelanggan listrik pada suatu wilayah. Dalam pemberian skor akan dilihat melalui proporsi masyarakat terlayani jaringan listrik dengan membandingkan jumlah rumah tangga berlangganan listrik dengan jumlah rumah tangga total.

Setelah dilakukan skoring dan pembobotan untuk seluruh indikator akhirnya akan didapatkan skor akhir yang akan menentukan tingkatan untuk variabel tingkat kemiskinan. Penentuan tingkat kemiskinan akan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata skor yang diperoleh. Nilai tersebut selanjutnya akan menjadi batasan penentu apakah masing-masing wilayah termasuk dalam tingkat kemiskinan tinggi atau rendah. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata yang didapatkan adalah 32,1 sehingga pembagian tingkatan urbanisasi adalah sebagai berikut.

Tabel I 7
Klasifikasi Skor Tingkat Kemiskinan

No	Skor	Tingkatan
1	19 - <32,1	Rendah
2	>32,1-49	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Tahap selanjutnya pun sama seperti yang dilakukan dalam menganalisis tingkat urbanisasi. Setelah didapatkan tingkatan kemiskinan untuk masing-masing wilayah berdasarkan hasil skoring dan pembobotan, selanjutnya akan dilakukan pemetaan tingkat kemiskinan berdasarkan batas administratif. Pemetaan tersebut dilakukan untuk melihat pola-pola kemiskinan yang ada di daerah Pantura Jawa Tengah.

c) Analisis Tipologi Urbanisasi dan Kemiskinan

Analisis ini bertujuan untuk menentukan karakteristik urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi di masing-masing wilayah. Analisis yang akan dilakukan pada tahapan ini adalah analisis *overlay* yakni dengan cara menggabungkan peta tingkat urbanisasi dan peta tingkat kemiskinan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu akan dilakukan analisis spasial deskriptif untuk menjelaskan pola-pola tipologi yang ada di daerah Pantura Jawa Tengah. Kuadran tipologi urbanisasi dan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.7.



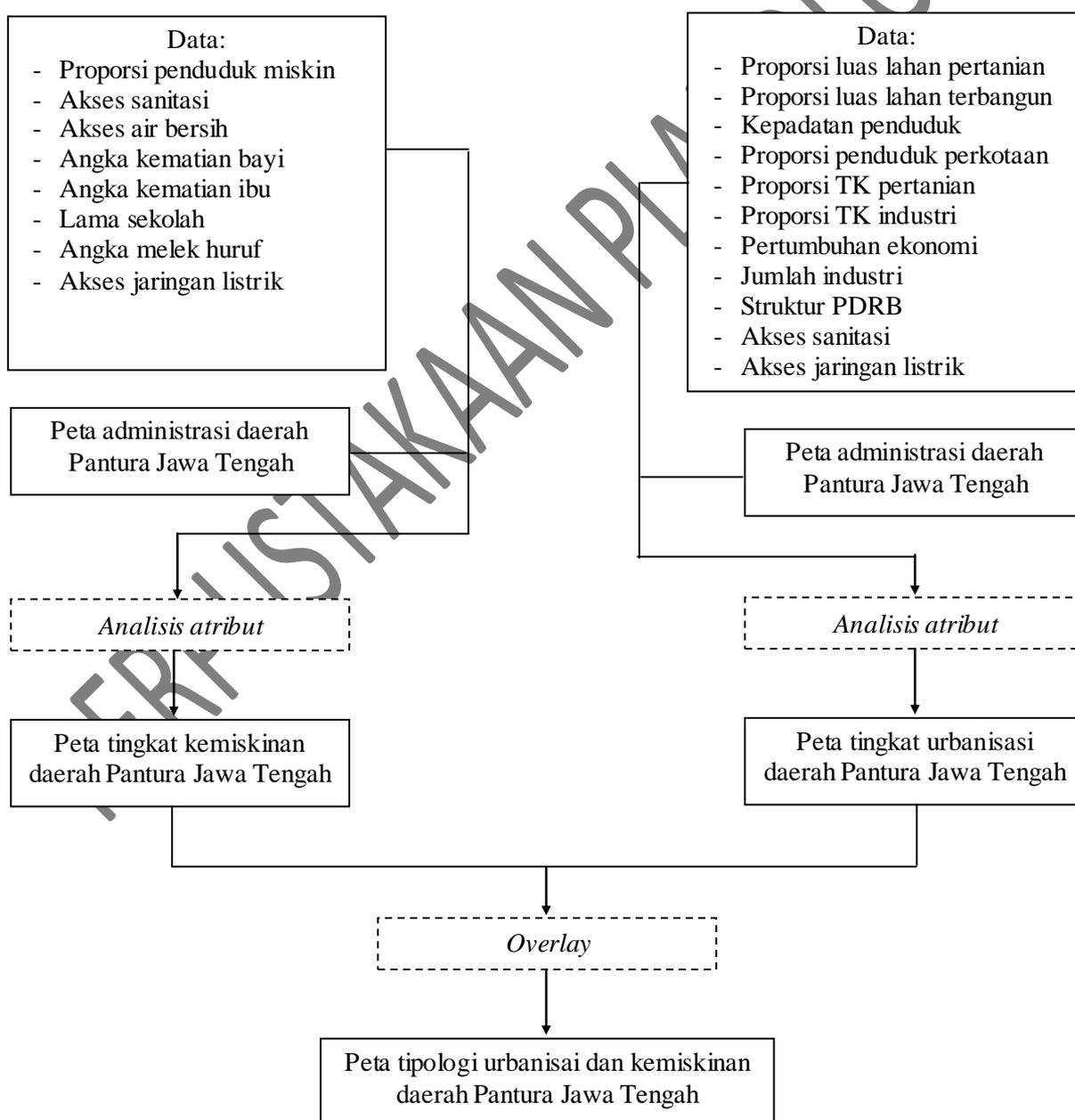
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Gambar 1.7
Tipologi Urbanisasi dan Kemiskinan

Dari hasil analisis tipologi urbanisasi dan kemiskinan yang didapatkan melalui skoring dan pembobotan selanjutnya akan dibuat menjadi sebuah peta dengan menggunakan analisis *overlay* pada ArcGIS. Peta ini akan memberikan kemudahan dalam membaca hasil tipologi yang telah didapatkan. Selain itu dapat lebih memudahkan untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang memiliki tipologi yang sama. Dalam membuat peta tipologi tentunya diperlukan data-data yang digunakan sebagai indikator dalam menentukan tingkat urbanisasi dan kemiskinan. Alur pembuatan peta tipologi dapat dilihat pada Gambar 1.8.

Peta yang akan *overlay* adalah peta tingkat urbanisasi dan peta tingkat kemiskinan. Sebelumnya pembuatan peta tingkat urbanisasi dan tingkat kemiskinan dibuat melalui analisis

atribut dengan ketentuan skoring, pembobotan, dan klasifikasi yang telah dijelaskan pada Tabel I.2 hingga Tabel I.5 sehingga akan didapatkan peta tingkat urbanisasi dan peta tingkat kemiskinan untuk daerah Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya kedua peta akan *overlay* sehingga menghasilkan peta tipologi urbanisasi dan kemiskinan daerah Pantura Jawa Tengah. Dari peta tersebut dapat terlihat pola persebaran tipologi berdasarkan jenis kuadran yang telah disebutkan pada Gambar 1.7. Dari 11 kabupaten dan 3 kota pada wilayah studi dapat dilihat kota atau kabupaten mana saja yang termasuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Gambar 1.8
Bagan Analisis Overlay

Perbedaan tipologi urbanisasi dan kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota kemudian dapat dianalisis lebih lanjut dengan melihat peta hasil analisis autokorelasi spasial. Dari kedua hal tersebut dapat diketahui perbedaan pengaruh masing-masing variabel untuk kabupaten/kota yang ada di daerah Pantura Jawa Tengah. Meskipun terdapat beberapa kabupaten/kota yang berada dalam satu jenis tipologi variabel penentunya bisa saja berbeda. Melalui peta hasil analisis autokorelasi dapat dilihat kelompok daerah yang memiliki kemiripan variabel tertentu sehingga dapat diketahui variabel penentu urbanisasi dan kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota.

d) Analisis Hubungan Urbanisasi dan Kemiskinan

Untuk mengetahui hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah digunakan teknik analisis koefisien korelasi. Melalui analisis ini dapat dilihat seberapa kuat keterhubungan atau korelasi dan signifikansi antara urbanisasi dan kemiskinan di wilayah studi. Variabel yang digunakan dalam analisis koefisien korelasi terdiri dari 2 jenis yakni variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Pada penelitian ini variabel yang akan digunakan dalam melakukan analisis koefisien korelasi adalah tingkat urbanisasi sebagai variabel bebas (X) dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat (Y). Kedua variabel tersebut didapatkan dari hasil skoring yang dilakukan pada masing-masing variabel berdasarkan berbagai indikator yang telah ditentukan. Pengaruh antara kedua variabel tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi yang dilambangkan dengan r . Nilai maksimal r adalah 1 dengan nilai minimal -1. Nilai r positif memiliki arti bahwa hubungan antara kedua variabel adalah positif atau berbanding lurus. Sedangkan nilai r negatif memiliki arti bahwa hubungan antara kedua variabel adalah negatif atau berbanding terbalik. Nilai r akan bervariasi mulai dari -1 hingga 1, keterangan lebih lanjut mengenai interpretasi nilai r dapat dilihat pada Tabel I.8.

Tabel I.8
Interpretasi Nilai r

Nilai r	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01-0,20	Sangat rendah
0,21-0,40	Rendah
0,41-0,60	Agak rendah
0,61-0,80	Cukup
0,81-0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

Sumber: Usman dan Akbar, 2008

Selain 4 analisis yang telah dijelaskan di atas akan dilakukan juga analisis spasial menggunakan software ArcGIS dengan hasil akhir berupa peta. Dalam melakukan analisis tingkat urbanisasi dan tingkat kemiskinan akan dilakukan analisis autokorelasi spasial untuk melihat pengelompokan spasial serta pola persebaran urbanisasi dan kemiskinan. Wuryandari et al (2014) mengemukakan bahwa autokorelasi spasial adalah taksiran dari korelasi antar nilai amatan yang berkaitan dengan lokasi spasial pada variabel yang sama. Autokorelasi spasial positif menunjukkan adanya kemiripan nilai dari lokasi-lokasi yang berdekatan dan cenderung berkelompok. Sedangkan autokorelasi spasial yang negatif menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang berbeda dan cenderung menyebar. Pada penelitian ini pengukuran autokorelasi spasial akan menggunakan metode Moran's I (Indeks Moran). Moran's I mengukur korelasi satu variabel misal x (x_i dan x_j) dimana $i \neq j$ dengan banyak data sebesar n . Berikut merupakan rumus perhitungan Moran's I:

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Keterangan:

I = Indeks Moran

n = banyaknya lokasi kejadian

x_i = nilai pada lokasi i

x_j = nilai pada lokasi j

\bar{x} = rata-rata dari jumlah variabel atau nilai

W_{ij} = matriks pembobot antara daerah i dan j

Nilai indeks I berkisar antara -1 dan 1. Nilai positif menunjukkan adanya kemiripan dari lokasi-lokasi yang berdekatan dan cenderung berkelompok. Sementara nilai negatif menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang berbeda dan cenderung menyebar. Jika indeks moran bernilai 0 maka mengindikasikan bahwa tidak berkelompok. Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi spasial atau tidak maka perlu dilakukan uji signifikansi indeks moran. Uji hipotesis indeks moran adalah sebagai berikut:

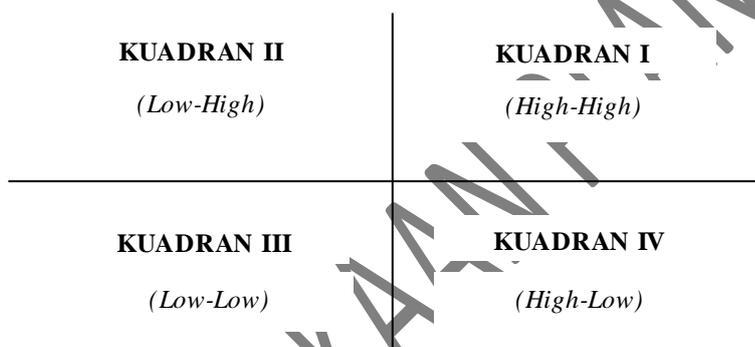
- 1) Hipotesis H_0 = tidak terdapat autokorelasi spasial
 H_1 = terdapat autokorelasi spasial
- 2) Tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (peluang kesalahan 5%)
- 3) Statistik uji

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{Var(I)}} \approx N(0,1)$$

$$\text{dengan } E(I) = -\frac{1}{n-1} \quad \text{Var}(I) = \frac{n^2 \cdot S_1 - n \cdot S_2 + 3 \cdot S_0^2}{(n^2 - 1)S_0^2} - [E(I)]^2$$

$$S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \quad S_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{ij} + w_{ji})^2 \quad S_2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} + \sum_{j=1}^n w_{ji} \right)^2$$

Pengujian ini akan menolak hipotesis awal jika nilai Zhitung > Z(α) (autokorelasi positif) atau Zhitung < - Z(α) (autokorelasi negatif). Autokorelasi spasial dengan nilai positif mengindikasikan bahwa antar lokasi pengamatan memiliki keeratan hubungan. Pola pengelompokan dan penyebaran antar lokasi dapat dilihat melalui Moran's Scatterplot. Moran's Scatterplot adalah alat yang digunakan untuk melihat hubungan antara nilai pengamatan yang terstandarisasi dengan nilai rata-rata tetangga yang sudah terstandarisasi. Moran's Scatterplot dapat digunakan untuk mengidentifikasi keseimbangan atau pengaruh spasial. Tipe-tipe hubungan spasial berdasarkan Moran's Scatterplot dapat dilihat pada Gambar 1.9.



Sumber: Wuryandari et al, 2014

Gambar 1.9
Moran's Scatterplot

Interpretasi:

- Kuadran I (*High-High*) menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai amatan tinggi dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai amatan tinggi.
- Kuadran II (*Low-High*) menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai amatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai amatan tinggi.
- Kuadran III (*Low-Low*) menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai amatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai amatan rendah.
- Kuadran IV (*High-Low*) menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai amatan tinggi dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai amatan rendah.

Analisis autokorelasi spasial ini dilakukan terhadap hasil tingkat urbanisasi, tingkat kemiskinan, serta tipologi urbanisasi dan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk melihat pola sebaran spasial dari variabel-variabel tersebut dengan output berupa peta.

1.9 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir yang akan dibagi menjadi 5 bagian yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka pikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II KAJIAN LITERATUR URBANISASI DAN KEMISKINAN

Bab ini berisikan mengenai kajian literatur terkait urbanisasi seperti definisi, aspek, penyebab serta dampaknya bagi suatu wilayah. Selanjutnya akan dibahas kajian literatur terkait kemiskinan meliputi definisi, penyebab, klasifikasi, serta indikatornya.

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai karakteristik urbanisasi dan kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota daerah Pantura Jawa Tengah.

BAB IV ANALISIS URBANISASI DAN HUBUNGANNYA TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

Bab ini berisikan analisis yang digunakan dalam penelitian yakni analisis tingkat urbanisasi, analisis tingkat kemiskinan, analisis tipologi urbanisasi dan kemiskinan, analisis korelasi kedua variabel tersebut, serta analisis autokorelasi spasial untuk tingkat urbanisasi, kemiskinan, dan tipologi urbanisasi-kemiskinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi akan kebijakan terkait dengan tema yang diambil.